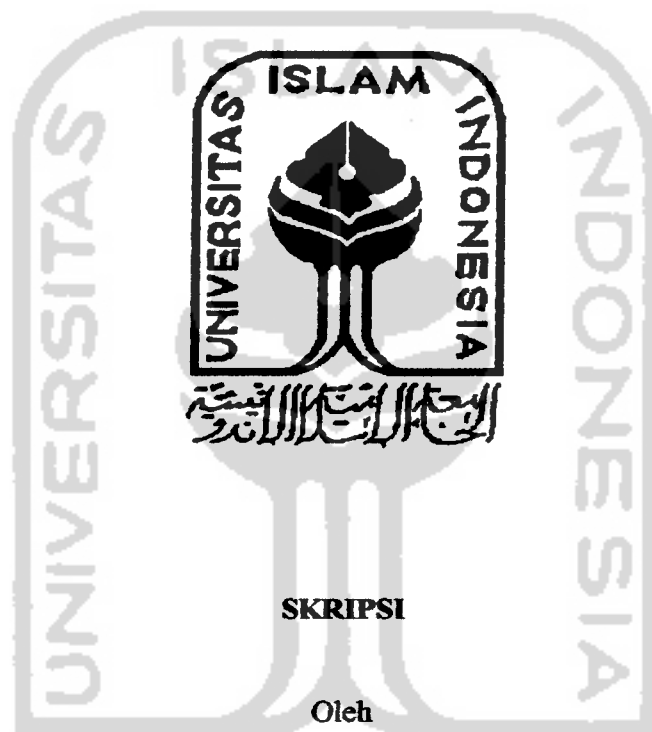


**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH DI  
JAWA TENGAH**



Nama : Ismu Indra Prabawa  
Nomor Mahasiswa : 01312433

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2006**

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH DI  
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat  
untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi  
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh

Nama : Ismu Indra Prabawa  
Nomor Mahasiswa : 01312433

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2006**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

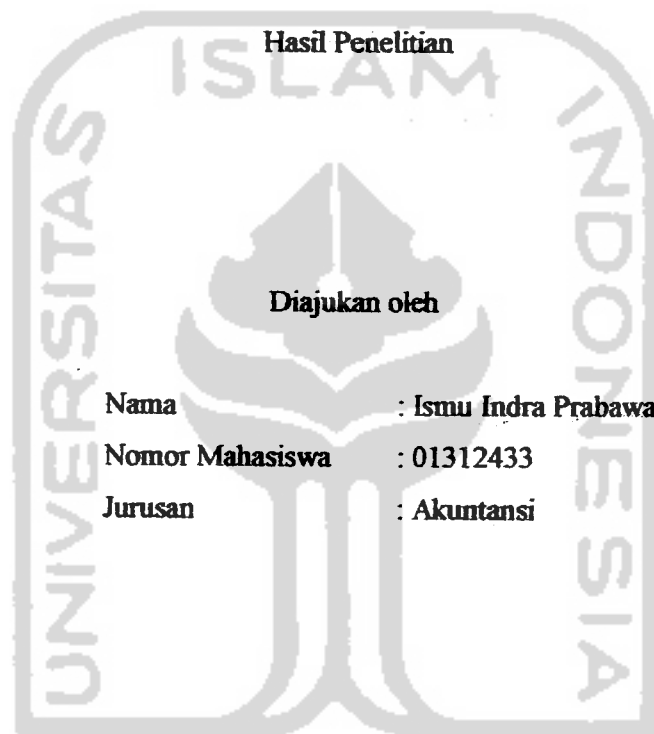
“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, .....2006

Penyusun,

**Ismu Indra Prabawa**

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH DI  
JAWA TENGAH**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal... 8-5-06

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin', written in a cursive style.

(Drs. Johan Arifin, M.Si)

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah  
(PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah**

Disusun Oleh: ISMU INDRA PRABAWA  
Nomor mahasiswa: 01312433

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 15 Juni 2006

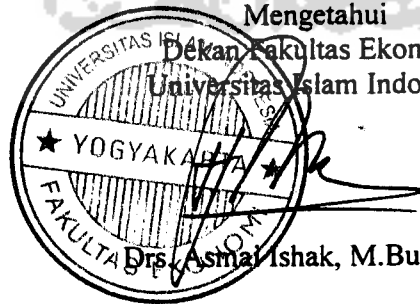
Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Johan Arifin, M.Si

Penguji : Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Drs. Asmal Ishak, M.Bus, Ph.D

## MOTTO

**"Keberhasilan adalah sebuah proses,  
proses yang baik dengan usaha yang sungguh – sungguh,  
akan membuahkan hasil yang baik bahkan prestasi"**

**"Semakin tinggi ilmu seseorang maka ia harus sadar akan kebodohnya,  
semakin kaya seseorang maka ia harus tahu bahwa jurang kemiskinan  
semakin dekat dengannya"**



## **PERSEMBAHAN**

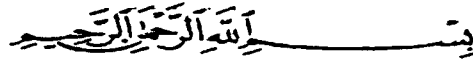
**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

**Papa dan mama, terima kasih atas do'a dan tahajudnya yang selalu mengiringi perjalanan hidupku yang selalu mengharap yang terbaik buat aku.**

**Eva Rihandhini, terima kasih buat pengertian, perhatian dan segalanya yang telah kamu berikan.**

**Kakaku Mbak Lia dan keluarga**

## KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'ala, atas segala karunia dan rahmat-Nya yang tak terhitung berupa kasih sayang, nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untaian sholawat tak lupa penulis sanjungkan kepada Rosulullah Muhammad Shollallaahu Alaihi Wa Sallam yang dinantikan syafa'atnya kelak di yaumul akhir.

Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan untuk melatih diri agar peka terhadap perkembangan ilmu khususnya dalam Bidang Ekonomi.

Proses penulisan skripsi ini tentu saja banyak menemui masalah dan kendala. Faktor – faktor tersebut tidak akan teratasi tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak baik secara moral maupun material. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus dan setinggi – tingginya kepada:



1. Bapak Drs. Johan Arifin, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan segala kemudahan, masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Papa dan mama tercinta atas segala doa dan tahajudnya.
3. Eva Rihandhini atas segala pengertian, motivasi dan segala bantuannya. Sosok yang membawa perubahan, inspirasi dan dengan sabar memberikan cinta, perhatian, waktu luang bagi penulis.
4. Mbak Lia dan keluarga yang selalu memberikan semangat, dorongan dan dukungannya.
5. Teman – temanku satu kontrakan Afif "Gandhen" dan "Ustad" Budi yang selalu membantu, menemani dan selalu berbagi dalam kesenangan dan kesedihan.
6. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan para dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Teman – teman sesama bimbingan Bapak Johan Arifin atas diskusi dan masukannya selama menunggu bimbingan.
8. Semua rekan – rekan mahasiswa FE UII, khususnya jurusan akuntansi "kelas E" angkatan 2001.
9. Semua pihak – pihak lain yang telah turut membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Di sadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini tidak lepas dari keterbatasan pada diri penulis yang masih dalam taraf belajar. Maka dari itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun baik

mengenai isi, pembahasan ataupun segala hal sangat diharapkan oleh penulis. Harapan penulis semoga sesuatu yang telah dikerjakan dapat dimanfaatkan secara optimal serta mendapatkan hikmah yang berharga dari apa yang dirasakan selama penyusunan skripsi.

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, April 2006

Penulis



## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Berita Acara .....	v
Halaman Motto .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
Abstrak .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1. Dana Alokasi Umum (DAU) .....	6
2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	7
2.3. Belanja Daerah .....	12
2.4. Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesis .....	12

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1. Data .....	22
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	23
3.4. Metode Analisis Data .....	25
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1. Analisis Hasil Regresi Sederhana .....	27
4.2. Analisis Regresi Berganda .....	35
4.3. Pengujian Terhadap <i>Flypapper Effect</i> .....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
5.1. Kesimpulan .....	43
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	45
5.3. Saran .....	46
5.4. Implikasi .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
4.1. Pengaruh $DAU_t$ Terhadap $BD_t$ .....	28
4.2. Pengaruh $DAU_{t-1}$ Terhadap $BD_t$ .....	30
4.3. Pengaruh $PAD_t$ Terhadap $BD_t$ .....	32
4.4. Pengaruh $PAD_{t-1}$ Terhadap $BD_t$ .....	34
4.5. Pengaruh $DAU_t$ dan $PAD_t$ Terhadap $BD_t$ .....	36
4.6. Pengaruh $DAU_{t-1}$ dan $PAD_{t-1}$ Terhadap $BD_t$ .....	37
4.7. Perbandingan Pengaruh $DAU_t$ dengan $PAD_t$ terhadap $BD_t$ .....	40
4.8. Perbandingan Pengaruh $DAU_{t-1}$ dengan $PAD_{t-1}$ terhadap $BD_t$ .....	41

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
1.	Ringkasan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001-2004	50
2.	Ringkasan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001-2004	52
3.	Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001-2004	54
4.	Hasil Pengolahan Data Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001-2004	56

### **Abstraksi**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah transfer atau DAU dari pemerintah pusat (Pempus) dan PAD berpengaruh terhadap belanja pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia dengan sampel kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Data yang dianalisis adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2001-2004, yang berupa realisasi DAU, realisasi PAD dan realisasi Belanja Daerah (BD) yang didapatkan melalui internet pada situs Departemen Keuangan. Regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh DAU dan PAD secara terpisah. Sedangkan regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh DAU dan PAD secara bersama.*

*Hasil analisis menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah maupun serentak berpengaruh terhadap belanja daerah, baik dengan maupun tanpa lag. Penelitian ini juga akan menguji tentang keberadaan flypapper effect.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang masalah**

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijaksanaan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Budiono (dalam Sidik et al, 2002:v), tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah. Dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi landasan otonomi tersebut dijelaskan lebih jauh bagaimana pengaplikasian hal – hal tersebut melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP), yang kemudian dipandu dengan Kepmendagri No. 29/2002.

Kepmendagri No. 29/2002 menyiratkan bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana – dana yang dikelolanya. Pemda diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yang meliputi:



1. Neraca Daerah. Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD dan Laporan Aliran Kas. Neraca Daerah menunjukkan posisi keuangan Pemda pada tanggal tertentu.
2. Laporan Perhitungan APBD dan Nota Perhitungan APBD memuat informasi tentang kinerja keuangan Pemda selama periode anggaran tertentu (meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan).
3. Laporan Aliran Kas menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemda dalam menghasilkan dan menggunakan kas dari aktifitas – aktifitas yang dilaksanakannya (operasi, investasi dan pendanaan).

Dari laporan APBD dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh Pemda selama satu tahun fiskal (Halim, 2002b). Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup tranfer dana perimbangan dari Pempus.

Di dalam UU No. 25/1999 (telah direvisi dengan UU No. 33 tahun 2004) ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan, yang terdiri DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Disamping dari dana perimbangan tersebut Pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain – lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan kepada Pemda. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian pemerintah daerah otonom dapat merencanakan anggaran

pendapatan daerahnya sendiri sesuai dengan kebijakan serta inisiatif sendiri dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga nya

Pada prakteknya transfer dari Pempus merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai operasi utama sehari – hari, yang oleh Pemda ”dilaporkan” diperhitungan dalam APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar-pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002). Di Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60% untuk pemerintahan daerah (Fischer, 1996). Khusus di negara bagian Wisconsin di AS, sebesar 47% pendapatan pemda berasal dari Pempus (Deller et al, 2002). Di Indonesia, pada dekade 1990-an, presentase ini mencapai 72% pengeluaran provinsi dan 86% pengeluaran kabupaten/kota. Di negara-negara lain, presentase transfer atas pengeluaran Pemda adalah 85% di Afrika Selatan, 67%-95% di Nigeria, 70%-90% di Meksiko.

Penelitian tentang belanja pemerintah daerah dan faktor – faktor yang mempengaruhinya merupakan hal yang penting untuk dilakukan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa sandaran pemerintah daerah untuk menentukan besarnya belanja daerah suatu periode berbeda serta dapat memberikan petunjuk bahwa pemerintah daerah ”menunggu” berapa alokasi DAU yang diperolehnya sebelum menentukan berapa belanja yang akan dikeluarkannya. Pengetahuan dapat juga berguna bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan APBN dan

Kepres tentang DAU jauh sebelum tahun berjalan sehingga pemerintah daerah dapat menyusun APBD dengan lebih baik.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penelitian ini membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah?

## **1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Seperti yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap besarnya Belanja Daerah.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

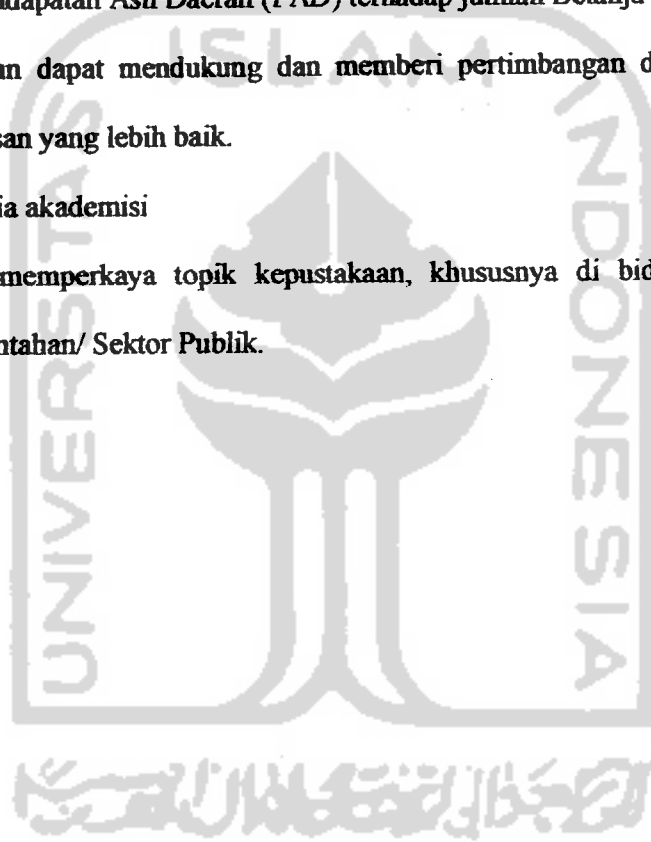
1. Bagi Mahasiswa:
  - a. Penelitian ini merupakan kesempatan baik bagi mahasiswa dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah.
  - b. Menambah pengetahuan mahasiswa mengenai penerapan akuntansi di Pemerintahan

## 2. Bagi Pemerintah

- a. Memberi masukan bagi pemerintah, khususnya sejauh mana Pemerintah Daerah dimasa otonomi menetapkan tingkat pengeluaran/ belanja daerahnya masing – masing.
- b. Membuka wawasan baru mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah Belanja Daerah, dengan demikian dapat mendukung dan memberi pertimbangan dalam membuat keputusan yang lebih baik.

## 3. Bagi dunia akademisi

- a. Dapat memperkaya topik kepustakaan, khususnya di bidang Akuntansi Pemerintahan/ Sektor Publik.



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Di Indonesia, seperti yang ditegaskan dalam UU No. 25/1999, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (*revenue sharing*). Transfer merupakan konsekuensi tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktifitas perekonomian di daerah. Transfer atau *grant* dari Pusat secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni *matching grant* dan *non-matching grant*. Kedua *grant* tersebut digunakan oleh Pemda untuk memenuhi belanja rutin dan belanja pembangunan.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan bagian dari dana perimbangan, selain bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi khusus (DAK), dan bantuan keuangan. DAU diterima oleh provinsi kabupaten/ kota berdasarkan formula dan faktor – faktor lain yang ditetapkan oleh Keppres. Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang – kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing – masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum seperti yang ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/ kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/ kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksudkan diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/ kota diseluruh Indonesia.

Pembagian DAU dilakukan dengan memperhatikan (Mardiasmo, 2002):

- a. Potensi daerah (PAD, PBB, BPHTB dan bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam).
- b. Kebutuhan pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah.
- c. Tersedianya dana APBN,

Dengan demikian Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

## **2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002a), seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain – lain. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan

daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi yang bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

1. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
2. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

#### 2.2.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002)

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, dirinci menjadi:

a. Pajak Propinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air,
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Jenis pajak Kabupaten/ kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan
7. Pajak Parkir

### 2.2.2. Retribusi

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus



disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU No. 34 tahun 2000 dan PP No. 66 tentang retribusi daerah, retribusi daerah dapat dikelompokkan:

1. **Objek Retribusi Jasa Umum** adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Seperti: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dan lain – lain.
2. **Objek Retribusi Jasa Usaha** adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Penyedotan Kakus; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Retribusi Penyeberangan di Atas Air; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan lain – lain.

3. **Retribusi Perizinan Tertentu** adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, seperti: **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**; **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**; **Retribusi Izin Gangguan**; **Retribusi Izin Trayek** dan lain – lain.

#### **2.2.3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Jenis pendapatan ini antara lain, bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah dan lain - lain. UU mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah dan kontribusi BUMD kepada anggaran daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah.

#### **2.2.4. Lain – lain PAD yang sah**

Yang termasuk dalam rincian penerimaan lain – lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang – barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah) dan lain – lain.

### **2.3. Belanja Daerah**

Di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/ 2002 disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat).

Pada prakteknya belanja dibagi kedalam dua kelompok yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah belanja yang sifatnya terus menerus untuk setiap tahun fiscal dan umumnya tidak menghasilkan wujud fisik (contoh: belanja gaji dan honorarium pegawai), sementara belanja pembangunan umumnya menghasilkan wujud fisik, seperti jalan, jalan bebas hambatan (*highway*), jembatan, gedung, pengadaan jaringan listrik dan air minum dan sebagainya. Belanja pembangunan non-fisik diantaranya mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemeliharaan keamanan masyarakat.

### **2.4. Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesis**

Bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya merupakan pertanyaan penelitian yang sangat menarik sejak lama. Penelitian terdahulu menggunakan berbagai pendekatan untuk menjelaskan perilaku pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya, baik dana yang bersumber dari transfer pemerintah di atasnya ataupun dari pendapatannya sendiri. Pemerintah daerah bisa merespon transfer dari pemerintah pusat secara simetris dan tidak simetris (Gamkhar & Oates).

Dalam perspektif teori keagenan, Inman (1979) dan Rubenfeld (1987) (dalam Holzt-Eakin et al, 1994), Aaberg & Langorgen (1997), dan Slack (1980) menyatakan agen (*agent*) atau politisi di pemerintahan daerah bersikap seolah – olah mereka memaksimalkan utilitas individu (*voter*) berpendapat menengah ke bawah di dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan belanja publik untuk periode tertentu, agen akan mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya berdasarkan ekspektasinya terhadap lingkungan ekonomi pada masa yang akan datang. Secara teoritis diasumsikan bahwa semua pengeluaran pada periode tertentu tergantung pada ketersedianya sumber daya pada periode yang bersangkutan, namun dengan batasan aturan anggaran yang ada, misalnya anggaran berimbang (*balanced-budget rule*).

Dalam konsep anggaran berimbang Pemda diharuskan menyerahkan anggarannya kepada legislatif sebelum tahun fiskal berjalan, tetapi tidak mengatur bagaimana pengeluaran harus diprioritaskan atau bagaimana komponen – komponen pengeluaran ditentukan (Holzt-Eakin et al, 1994). Oleh karena itu Pemda dapat melakukan *smoothing* atas pengeluaran – pengeluarannya karena memang karena memang tidak ada aturan yang secara efektif digunakan untuk mencegahnya. Hal ini juga terjadi di Norwegia (Aaberge & Langorgen, 1997), dimana kebebasan untuk membuat prioritas atas pengeluaran untuk melayani masyarakatnya, meskipun tidak mutlak. Menurut Inman (1983 dalam Holzt-Eakin et al, 1994), pembuatan keputusan dalam sektor publik *backward-looking*. Di sisi lain, *time horizon* agen lebih panjang dari satu tahun anggaran, sehingga pada praktiknya beberapa pemda membentuk *rainy day funds* untuk memudahkan

*smooth* atas pengeluarannya atau menyusun anggaran untuk siklus beberapa (*multiyear budget*).

Analisis Zou (1994) berhasil mengidentifikasi beberapa konsekuensi dari perubahan *grants*, yakni:

1. kenaikan permanen dalam *matching grants* akan mempercepat investasi publik, memperbesar kapital jangka panjang dan memperbesar belanja rutin jangka panjang,
2. kenaikan permanen dalam *matching grants* untuk investasi dan belanja rutin, mungkin mempercepat atau memperlambat investasi,
3. kenaikan temporer atas *grants* sekarang (apapun bentuk *grants*) akan mendorong investasi publik,
4. kenaikan temporer *non-matching grants* pada masa yang akan datang akan mengurangi investasi sekarang dan meningkatkan belanja rutin sekarang,
5. kenaikan temporer *matching grants* pada masa yang akan datang untuk belanja rutin akan mengurangi investasi publik sekarang dan memperbesar belanja rutin sekarang, tapi
6. kenaikan sementara dalam *matching grants* pada masa yang akan datang untuk belanja investasi mempunyai dampak ambigu terhadap investasi publik.

Esensi dari temuan – temuan tersebut adalah adanya perubahan dalam total belanja daerah (rutin dan pembangunan) sebagai akibat perubahan dalam *grants* atau transfer dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Syukry & Halim tentang pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah di Jawa dan Bali (2003) juga menunjukkan hasil analisisnya bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, baik dengan maupun tanpa *lag*. Ketika tidak digunakan tanpa *lag*, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat dari pada DAU, tetapi dengan digunakan *lag* pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat dari PAD. Hal ini berarti terjadi *flypapper effect* dalam respon Pemda terhadap DAU dan PAD. Ketika kedua faktor DAU dan PAD diregres serentak dengan belanja daerah, pengaruh keduanya juga signifikan, baik dengan maupun tanpa *lag*. Dalam model prediksi tanpa *lag*, daya prediksi DAU lebih rendah PAD, tetapi sebaliknya dalam prediksi dengan *lag*, dengan demikian terjadi *flypapper effect*.

#### 2.4.1. Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002). Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sebagian lagi menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Aziz, 2000, Doi, 1998). Sementara studi mengenai pengaruh transfer atau *grants* dari Pempus terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemda sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Gamkhar & Oates, 1996). Secara teoritis, respon tersebut akan mempengaruhi efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendapatan lain, misalnya pendapatan pajak daerah (Bradford & Oates, 1971a).

Namun dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Artinya, stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau *grants* tersebut sering lebih besar dibanding dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (*flypaper effect*).

Holtz-Eakin et al (1985) menyatakan keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja pemerintah daerah. Studi Legrenzi & Milas (2001), menggunakan sampel municipalities di Italia, mengemukakan bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel – variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan respon yang *non-linear* dan *asymmetric*.

Gamkhar & Oates (1996) menganalisis respon Pemda terhadap jumlah transfer dari penerimaan federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Studi Holtz-Eakin et al (1994) menganalisis model *maximizing underuncertainty of intertemporal utility functional* dengan menggunakan data runtun selama tahun 1934-1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalkan melalui suatu model, dimana keputusan – keputusan didasarkan pada ketersediaan sumberdaya secara permanen, bukan ketersediaan yang bersifat temporer. Mereka menemukan bahwa semua *current spending* ditentukan oleh *current resources*.

Berdasarkan konsep dan temuan diatas, maka hipotesis alternatif untuk melihat DAU tahun berjalan ( $DAU_t$ ) terhadap belanja daerah tahun berjalan ( $BD_t$ ) dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1a :  $DAU_t$  berpengaruh positif terhadap  $BD_t$ ,

Studi Holtz-Eakin et al (1985) menemukan bahwa *grants* tahun lalu dapat memprediksi tahun ini, namun sebaliknya, belanja tahun lalu tidak dapat memprediksi pendapatan tahun berjalan. Hipotesis untuk melihat pengaruh DAU tahun lalu ( $DAU_{t-1}$ ) terhadap belanja daerah tahun berjalan ( $BD_t$ ) dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1b :  $DAU_{t-1}$  berpengaruh positif terhadap  $BD_t$ ,

#### 2.4.2. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al. 2000; Blackly, 1986; Joulfaian & Mokeerjee, 1990; Legrenzi & Milas, 2001; Von Furstenberg et al, 1986). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis* (Aziz et al. 2000; Doi, 1998; Von Furstenberg et al, 1986). Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintahan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (diantaranya adalah Cheng,



1999; Friedman, 1978; Hoover & Sheffrin, 1992). Cheng (1999) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara di Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Honduras dan Paraguay. Friedman (1978) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akan memperbesar defisit. Hal senada dikemukakan oleh Hoover & Sheffrin (1992), yang secara empiris menemukan adanya perbedaan dalam dua rentan waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sedangkan sampel untuk tahun sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mengetahui.

Hipotesis untuk menguji pengaruh PAD terhadap belanja daerah adalah sebagai berikut:

H2a :  $PAD_t$  berpengaruh positif terhadap  $BD_t$ ,

H2b :  $PAD_{t-1}$  berpengaruh positif terhadap  $BD_t$ ,

#### 2.4.3. *Flypaper Effect*

Beberapa penelitian menemukan bahwa respon Pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Artinya, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak). Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut *flypaper effect* (oates, 1999).

Dalam teori *individual choice* dinyatakan bahwa transfer dari pusat berupa DAU akan menyebabkan pengaruh yang besar dalam pembelanjaan barang public sehingga besarnya jumlah transfer yang diterima akan menentukan jumlah belanja yang akan dilakukan ("*dollar-to-dollar, a matching grants will induce a greater expansion in spending on the public goods will than be a lump-sum, unconditional grant*") namun sesungguhnya teori ini kurang tepat digunakan untuk menganalisa efek transfer karena *grants* tidak diberikan kepada individu, tetapi pada kelompok orang. Artinya, efek *grants* terhadap pengeluaran tergantung pada proses pengambilan keputusan kolektif oleh individu – individu tersebut. Beberapa studi empiris berikutnya kemudian menunjukkan bahwa perbedaan stimulus antara *grants* dan pendapatan sendiri memang terjadi (Andersson, 2002; dan Aaberge & Langorgen, 1997; Deller et al, 2002; dan Slack, 1980). Slack (1980) melakukan studi analisis dan empiris dengan sampel dengan sampel *municipalities* di Kanada dan menyatakan bahwa *unconditional grants* kepada *municipalities* diiringi dengan kenaikan dalam pengeluaran *municipalities* (tetapi dengan jumlah yang lebih kecil dari *grants*). Namun respon belanja terhadap *conditional grants* tidak terlalu tegas, sehingga harus hati – hati dalam menginterpretasi hubungan *conditional grants*- belanja daerah.

Studi Andersson (2002) tentang perubahan sistem *grants* terhadap pengeluaran pemda di Swedia menemukan bahwa kenaikan *non-matching grants* akan menyebabkan kenaikan dalam pendapatan yang bersumber dari pajak. Kenaikan tarif pajak tinggi menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Menurut Andersson, efek dari *non-matching grants* lebih besar dari *matching*

*grants* dan efek ini tergantung pada penurunan relatif atas *non-matching grants* untuk beberapa periode. Hasil ini mendukung hipotesis *flypapper effect*.

Studi Aaberge & Langorgen (1997) menganalisis perilaku fiskal dan belanja Pemda dengan *simultaneous setting* dan menemukan adanya *flypapper effect* dalam respon daerah terhadap pendapatan. Bagi Pemda yang menjadi masalah dalam pembuatan keputusan alokasi sumberdaya adalah pemilihan kombinasi terbaik antara pajak daerah, surplus dan defisit anggaran dan output dalam pelayanan publik yang dibatasi oleh "aturan" bahwa pengeluaran daerah plus surplus anggaran tidak melebihi *grants* dari Pempus, plus pajak daerah. Dengan demikian, dapat dilihat perbedaan dampak antara *grants* dan pendapatan pajak daerah terhadap perilaku fiskal dan belanja daerah.

Deller et al (2002) menganalisis hubungan pendapatan yang berasal dari bagi hasil dengan menggunakan data 581 dan *villages* di Wisconsin, Amerika Serikat dan menemukan bahwa untuk setiap dollar kenaikan dalam pendapatan per kapita, maka pengeluaran total per kapita meningkat 12-15 sen. Untuk setiap kenaikan dalam pendapatan bagi hasil per kapita maka pengeluaran per kapita mencapai 46-55 sen. Hasil ini konsisten dengan hipotesis *flypapper effect*. Selain itu juga ditemukan adanya temuan penurunan dalam pendapatan pajak properti per kapita sebesar 32-41 sen sebagai akibat dari setiap kenaikan sebesar satu dollar dalam pendapatan bagi hasil. Sementara bagi hasil menstimulasi pengeluaran lebih besar dari pajak properti. Deller et al (2002) menduga bahwa pola respon ini juga dipengaruhi oleh formula penentuan bagi hasil itu sendiri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Data**

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diseluruh pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah yang berupa realisasi belanja daerah, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing pemerintah kabupaten/ kota yang ada. Adapun Provinsi Jawa Tengah sendiri terdiri dari 35 pemerintahan kabupaten/ kota, yang terbagi menjadi menjadi 29 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah kota.

#### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Cara pemilihan data akan dilakukan secara tidak random atau bersifat purposive. Purposive sampling adalah penentuan sample berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari *misspesifikasi* dalam penentuan sampel penelitian, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis, selain itu pemilihan data secara purposive ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representative berdasarkan kualifikasi yang ditentukan.

Adapun kualifikasi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah yang berada di wilayah Jawa Tengah

2. Pemerintah daerah yang menyertakan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2001-2004

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya. Peneliti mendapatkan data realisasi APBD kabupaten/ kota se-Jawa Tengah melalui situs internet Departemen Keuangan dengan alamat website [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)

### **3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **3.3.1. Definisi Operasional**

##### **a. Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat). Pada prakteknya belanja dibagi kedalam dua kelompok yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah belanja yang sifatnya terus menerus untuk setiap tahun fiscal dan umumnya tidak menghasilkan wujud fisik (contoh: belanja gaji dan honorarium pegawai). Belanja pembangunan umumnya menghasilkan wujud fisik, seperti jalan, jalan bebas hambatan (*highway*), jembatan, gedung, pengadaan jaringan listrik dan air minum dan sebagainya. Belanja pembangunan non-fisik diantaranya mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemeliharaan keamanan masyarakat.

Besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah di Jawa Tengah dapat dilihat lampiran 1.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Besarnya distribusi DAU yang diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah Jawa Tengah dapat dilihat pada lampiran 2

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002a), seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain – lain. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi yang bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. lain-lain PAD yang sah.

Besarnya PAD yang diterima oleh masing-masing Pemda di Jawa Tengah dapat dilihat pada lampiran 3.

### 3.3.2. Pengukuran Variabel

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji maka variabel – variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel tergantung (*dependent variable*), dalam penelitian ini variabel tergantungnya adalah belanja daerah.
2. Variabel bebas (*Independent variable*), dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing pemerintah kabupaten/ kota yang ada.

Baik variabel tergantung maupun variabel bebas pengukurannya sudah tersedia dalam laporan realisasi APBD pada masing – masing pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Tengah, sehingga dalam hal ini peneliti bisa langsung mengambil data realisasi belanja daerah sebagai variabel tergantung dan data realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel bebas.

### 3.4. Metode Analisis Data

Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah, alat analisis statistik yang digunakan adalah regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regression*) (Hoover & Sheffrin, 1992). Regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh masing–masing jumlah DAU dan PAD terhadap jumlah belanja daerah, sehingga persamaan regresinya sebagai berikut:

$$BJD_t = a + bX_t + e$$

Dimana:

$BJD_t$  = jumlah atau perubahan jumlah belanja daerah tahun berjalan

$a$  = konstanta

$b$  = koefisien regresi

$X_t$  = jumlah  $DAU_t$  atau jumlah  $PAD_t$

$e$  = error term

Regresi berganda digunakan untuk memprediksikan apakah komponen - komponen pendapatan daerah tersebut secara serentak mempengaruhi belanja daerah, sehingga persamaan regresinya adalah:

$$BJD_t = a + b_1X_{1t} + b_2X_{2t} + e$$

Dimana:

$BJD_t$  = jumlah atau perubahan jumlah belanja daerah tahun berjalan

$a$  = konstanta

$b_1, b_2$  = koefisien regresi

$X_{1t}$  = jumlah  $DAU_t$  atau  $DAU_{t-1}$

$X_{2t}$  = jumlah  $PAD_t$  atau  $PAD_{t-1}$

$e$  = error term



## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab II sebelumnya telah diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan analisis hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah (BD) berdasarkan dengan teori yang terkait dan hasil penelitian – penelitian terdahulu yang pada dasarnya menyatakan memang ada hubungan antara ketiga variable tersebut.

Pada bab ini akan dibahas ada tidaknya pengaruh perubahan DAU dan PAD terhadap belanja daerah dengan menggunakan data – data dan alat analisis yang telah dijabarkan pada bab III.

#### 4.1. Analisis Hasil Regresi Sederhana

Regresi sederhana (*Simple Regresion*) digunakan untuk melihat pengaruh DAU dan PAD secara terpisah yang dilakukan dengan menggunakan dua model regresi, yakni regresi tanpa *lag* dan regresi dengan *lag* 1 tahun. Regresi tanpa *lag* dilakukan dengan meregresikan  $DAU_t$  dan  $BD_t$  untuk menguji hipotesis bahwa  $DAU_t$  mempengaruhi  $BD_t$ , sedangkan regresi dengan *lag* 1 tahun dimaksudkan untuk menguji apakah  $DAU_{t-1}$  dapat memprediksi  $BD_t$ .

##### 4.1.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD)

###### a. Regresi Sederhana Tanpa *lag*

Hasil analisis regresi sederhana tanpa *lag* untuk menguji pengaruh antara  $DAU_t$  terhadap  $BD_t$  dapat dilihat pada table 4.1 di halaman berikutnya

TABEL 4.1

Pengaruh  $DAU_t$  terhadap  $BD_t$ 

$BD_t = -14469130,01 + 1,338DAU_t$	
$Sig = 0,000$	$t - statistic = 20,375$
$F - statistic = 429,944$	
$R(R^2) = 0,870(0,757)$	
$Adjusted - R^2 = 0,755$	

Dari nilai t-statistic untuk regresi tersebut, terlihat  $DAU_t$  berpengaruh secara signifikan positif terhadap  $BD_t$ , hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistic sebesar 20,375. Nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel. Adapun besarnya pengaruh perubahan  $BD_t$  yang disebabkan oleh perubahan  $DAU_t$  ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  yaitu sebesar 75,7%. Hal ini bermakna jika terjadi kenaikan  $DAU_t$  sebesar 10% maka belanja daerah akan naik sebesar 7,57%, dengan demikian hipotesis pertama dari hipotesis pertama ( $H1a$ ) yang menyatakan bahwa  $DAU_t$  berpengaruh positif terhadap  $BD_t$  tidak dapat ditolak, hasil ini konsisten dengan pandangan Holtz-Eakin et al (1985), hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan Abdullah Syukriy dan Abdul Halim.

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa  $DAU_t$  sangat memberikan pengaruh terhadap belanja yang dikeluarkan oleh masing – masing pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Tengah, hal ini berarti bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer yang

diberikan oleh pemerintah pusat yang berupa DAU masih cukup tinggi. Konsekuensi dari pengaruh tersebut adalah jika terjadi perubahan transfer DAU akan diikuti pula dengan perubahan belanja daerah, artinya jika terjadi kenaikan DAU maka akan memperbesar pengeluaran terhadap belanja daerah demikian juga sebaliknya.

Kenaikan DAU yang diikuti juga dengan kenaikan belanja daerah dikarenakan karena kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemda hal ini sesuai dengan pandangan Aaberge dan Langorgen (1997) dimana kebebasan untuk membuat prioritas atas pengeluaran untuk melayani masyarakatnya, meskipun tidak mutlak. Selain itu kenaikan dari DAU akan mendorong adanya investasi (Analisis Zou, 1994)

#### **b. Regresi Sederhana dengan *lag* 1 Tahun**

Hasil analisis regresi sederhana dengan *lag* 1 tahun untuk menguji pengaruh antara  $DAU_{t-1}$  terhadap  $BD_t$ , dapat dilihat pada table 4.2 di halaman berikutnya

TABEL 4.2

Pengaruh  $DAU_{t-1}$  terhadap  $BD_t$ 

$BD_{2002} = 52397722,18 + 1,031DAU_{2001}$	
$Sig = 0,000$	$t - statistic = 10,087$
$F - statistic = 101,739$	
$R(R^2) = 0,869(0,755)$	
$Adjusted - R^2 = 0,748$	
$BD_{2003} = 22127468,328 + 1,501DAU_{2002}$	
$Sig = 0,000$	$t - statistic = 10,321$
$F - statistic = 106,52$	
$R(R^2) = 0,874(0,763)$	
$Adjusted - R^2 = 0,756$	
$BD_{2004} = 44709397,948 + 1,258DAU_{2003}$	
$Sig = 0,000$	$t - statistic = 10,231$
$F - statistic = 104,673$	
$R(R^2) = 0,872(0,760)$	
$Adjusted - R^2 = 0,753$	

Dari nilai t-statistic untuk ketiga regresi tersebut, terlihat  $DAU_{t-1}$  berpengaruh secara signifikan positif terhadap  $BD_t$ , hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistic sebesar 10,087 untuk tahun 2001, 10,321 untuk tahun 2002, 10,231 untuk tahun 2003. Nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel. Adapun besarnya pengaruh perubahan  $BD_t$  yang disebabkan oleh perubahan  $DAU_{t-1}$  ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  yaitu sebesar 75,5% untuk tahun

2002, 76,3% untuk tahun 2003 dan 76,0% untuk tahun 2004. Hal ini bermakna jika terjadi kenaikan  $DAU_{t-1}$  sebesar 10% maka belanja daerah akan naik sebesar 7,55% untuk tahun 2002, 7,63% untuk tahun 2003, dan 7,60% untuk tahun 2004, dengan demikian hipotesis kedua dari hipotesis pertama (H1b) yang menyatakan bahwa  $DAU_{t-1}$  berpengaruh positif terhadap  $BD_t$ , tidak dapat ditolak, hasil ini konsisten dengan pandangan Holtz-Eakin et al (1985), hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan Abdullah Syukriy dan Abdul Halim.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa DAU tahun lalu memberikan pengaruh terhadap besarnya belanja daerah tahun berjalan, dengan demikian besarnya belanja daerah dapat diprediksikan dengan besarnya DAU tahun yang lalu, artinya jika ada peningkatan dalam jumlah  $DAU_{t-1}$  maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah  $BD_t$ . Sehingga dalam hal ini dengan melihat DAU tahun lalu pemerintah daerah dapat memprediksi dalam menentukan besarnya dana yang akan dikeluarkan untuk belanja daerah.

#### **4.1.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah**

##### **a. Regresi Sederhana Tanpa lag**

Hasil analisis regresi sederhana tanpa lag untuk menguji pengaruh antara  $PAD_t$  terhadap  $BD_t$ , dapat dilihat pada table 4.3 di halaman berikutnya

TABEL 4.3

Pengaruh  $PAD_t$  terhadap  $BD_t$ 

$BD_t = 220272555,507 + 3,126PAD_t$	
$Sig = 0,000$	$t - statistic = 9,158$
$F - statistic = 83,87$	
$R(R^2) = 0,615(0,378)$	
$Adjusted - R^2 = 0,374$	

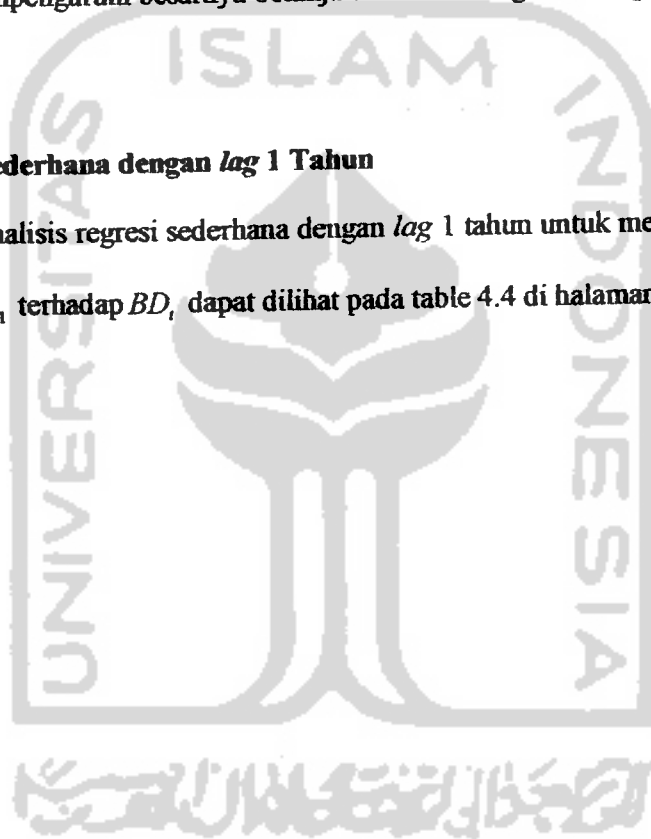
Dari nilai t-statistic untuk regresi tersebut, terlihat  $PAD_t$  berpengaruh secara signifikan positif terhadap  $BD_t$ , hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistic sebesar 9,158. Nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel. Adapun besarnya pengaruh perubahan  $BD_t$  yang disebabkan oleh perubahan  $PAD_t$  ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  yaitu sebesar 37,8%. Hal ini bermakna jika terjadi kenaikan  $PAD_t$  sebesar 10% maka belanja daerah akan naik sebesar 3,78%, dengan demikian hipotesis pertama dari hipotesis kedua (H2a) yang menyatakan bahwa  $PAD_t$  berpengaruh positif terhadap  $BD_t$  tidak dapat ditolak, hasil ini konsisten dengan pandangan Holtz-Eakin et al (1985), hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan Abdullah Syukriy dan Abdul Halim.

Dari hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa  $PAD_t$  memberikan pengaruh terhadap besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, artinya besarnya pengeluaran pemerintah daerah akan sangat mungkin disesuaikan dengan besarnya  $PAD_t$  yang diterima oleh masing – masing Pemda itu sendiri.

Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, hal inilah yang membuat masing – masing pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan PADnya masing – masing sehingga akan memperkecil defisit, sehingga perubahan terhadap PAD karena terbatasnya potensi dan kemampuan daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah akan sangat mungkin mempengaruhi besarnya belanja daerah masing – masing Pemda di Jawa Tengah.

**b. Regresi Sederhana dengan *lag* 1 Tahun**

Hasil analisis regresi sederhana dengan *lag* 1 tahun untuk menguji pengaruh antara  $PAD_{t-1}$  terhadap  $BD_t$  dapat dilihat pada table 4.4 di halaman berikutnya



TABEL 4.4

Pengaruh  $PAD_{t-1}$  terhadap  $BD_t$ 

$BD_{2002} = 236417100,3 + 1,898PAD_{2001}$	
Sig = 0,038	<i>t</i> - statistic = 2,164
<i>F</i> - statistic = 4,682	
$R(R^2) = 0,353(0,124)$	
Adjusted - $R^2 = 0,098$	
$BD_{2003} = 270096035,017 + 3,457PAD_{2002}$	
Sig = 0,000	<i>t</i> - statistic = 4,689
<i>F</i> - statistic = 21,986	
$R(R^2) = 0,632(0,400)$	
Adjusted - $R^2 = 0,382$	
$BD_{2004} = 274885680,921 + 2,889PAD_{2003}$	
Sig = 0,000	<i>t</i> - statistic = 4,757
<i>F</i> - statistic = 22,629	
$R(R^2) = 0,638(0,407)$	
Adjusted - $R^2 = 0,389$	

Dari nilai *t*-statistic untuk ketiga regresi tersebut, terlihat  $PAD_{t-1}$  berpengaruh secara signifikan positif terhadap  $BD_t$ , hal ini ditunjukkan dengan nilai *t*-statistic sebesar 2,164 untuk tahun 2001, 4,689 untuk tahun 2002, 4,757 untuk tahun 2003. Nilai *R* yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel. Adapun besarnya pengaruh perubahan  $BD_t$  yang disebabkan oleh perubahan  $PAD_{t-1}$  ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  yaitu sebesar 12,4% untuk tahun



2002, 40% untuk tahun 2003 dan 40,7% untuk tahun 2004. Hal ini bermakna jika terjadi kenaikan  $PAD_{t-1}$  sebesar 10% maka belanja daerah akan naik sebesar 1,24% untuk tahun 2002, 4% untuk tahun 2003, dan 4,07% untuk tahun 2004, dengan demikian hipotesis kedua dari hipotesis kedua (H2b) yang menyatakan bahwa  $PAD_{t-1}$  berpengaruh positif terhadap  $BD_t$ , tidak dapat ditolak, hasil ini konsisten dengan pandangan Holtz-Eakin et al (1985), hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan Abdullah Syukiy dan Abdul Halim.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa PAD tahun lalu memberikan pengaruh terhadap besarnya belanja daerah tahun berjalan, dengan demikian besarnya belanja daerah dapat diprediksikan dengan besarnya PAD tahun yang lalu, artinya jika ada peningkatan dalam jumlah  $PAD_{t-1}$  maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah  $BD_t$ . Sehingga dalam hal ini dengan melihat PAD tahun lalu pemerintah daerah dapat memperkirakan dalam menentukan besarnya dana yang akan dikeluarkan untuk belanja daerah.

#### **4.2. Analisis Regresi Berganda**

##### **a. Regresi Berganda Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) tanpa Lag**

Hasil regresi berganda tanpa lag untuk mendeteksi adanya pengaruh  $DAU_t$  dan  $PAD_t$  terhadap  $BD_t$ , dapat dilihat dalam tabel 4.5 di halaman berikutnya

TABEL 4.5

Pengaruh  $DAU_t$  dan  $PAD_t$  terhadap  $BD_t$

$BD_t = -20631259,76 + 1148DAU_t + 1,794PAD_t$		
$t - statistic =$	22,357	10,573
$Sig = 0,000$	$F - statistic = 443,453$	
$R(R^2) = 0,931(0,866)$		
$Adjusted - R^2 = 0,864$		

Dari nilai t-statistic untuk kedua regresi tersebut, terlihat  $DAU_t$  dan  $PAD_t$  berpengaruh secara signifikan positif terhadap  $BD_t$ , hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistic pada masing – masing yakni sebesar 22,357 dan 10,573. Nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel. Adapun besarnya pengaruh perubahan  $BD_t$  yang disebabkan oleh perubahan  $DAU_t$  dan  $PAD_t$  ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  yaitu sebesar 86,6%. Hal ini bermakna jika terjadi kenaikan  $DAU_t$  dan  $PAD_t$  sebesar 10% maka belanja daerah akan naik sebesar 8,66%.

Dari hasil tersebut diatas yang menunjukkan bahwa ketika  $DAU_t$  dan  $PAD_t$  dianalisis dengan menggunakan regresi berganda memberi pengaruh positif terhadap belanja daerah, hal ini berarti bahwa pada masing – masing pemda di Jawa Tengah setiap pengeluaran untuk belanja daerah sangat mungkin dipengaruhi oleh dua komponen sumber penerimaan daerah tersebut yaitu besarnya  $DAU_t$  yang diterima dari pemerintah pusat dan besarnya  $PAD_t$  yang dihasilkan Pemda itu sendiri. Sehingga perubahan terhadap besarnya  $DAU_t$  dan

PAD akan diikuti juga perubahan terhadap belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah.

**b. Regresi Berganda Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) dengan Lag 1 tahun**

Hasil regresi berganda dengan lag 1 tahun untuk medeteksi adanya pengaruh  $DAU_{t-1}$  dan  $PAD_{t-1}$  terhadap  $BD_t$  dapat dilihat dalam tabel 4.6

**TABEL 4.6**  
**Pengaruh  $DAU_{t-1}$  dan  $PAD_{t-1}$  terhadap  $BD_t$**

$BD_{2002} = 48872541,281 + 0,992DAU_{2001} + 0,629PAD_{2001}$		
$t - statistic =$	9,413	1,315
$Sig = 0,000$	$F - statistic = 52,859$	
$R(R^2) = 0,876(0,768)$		
$Adjusted - R^2 = 0,753$		
$BD_{2003} = 489211819 + 1,305DAU_{2002} + 2,358PAD_{2002}$		
$t - statistic =$	16,447	3,339
$Sig = 0,000$	$F - statistic = 236,033$	
$R(R^2) = 0,968(0,937)$		
$Adjusted - R^2 = 0,933$		
$BD_{2004} = 25922542,397 + 1,083DAU_{2003} + 1,907PAD_{2003}$		
$t - statistic =$	14,604	8,192
$Sig = 0,000$	$F - statistic = 190,733$	
$R(R^2) = 0,961(0,923)$		
$Adjusted - R^2 = 0,918$		

Dari nilai t-statistic untuk ketiga regresi tersebut, terlihat  $DAU_{t-1}$  dan  $PAD_{t-1}$  berpengaruh secara signifikan positif terhadap  $BD_t$ , hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistic sebesar 9,413 dan 1,315 untuk tahun 2001, 16,447 dan 9,339 untuk tahun 2002, 14,604 dan 8,192 untuk tahun 2003. Nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel. Adapun besarnya pengaruh perubahan  $BD_t$  yang disebabkan oleh perubahan  $DAU_{t-1}$  dan  $PAD_{t-1}$  ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  yaitu sebesar 76,8% untuk tahun 2002, 93,7% untuk tahun 2003 dan 92,3% untuk tahun 2004. Hal ini bermakna jika terjadi kenaikan  $DAU_{t-1}$  dan  $PAD_{t-1}$  sebesar 10% maka belanja daerah akan naik sebesar 7,68% untuk tahun 2002, 9,37% untuk tahun 2003, dan 9,23% untuk tahun 2004. Jika dilihat dari nilai t-statistik, signifikan pada  $PAD_{2001}$  adalah 0,198 hal ini dikarenakan pada tahun 2001 PAD pada masing – masing Pemda di Jawa Tengah masih rendah sehingga ketika diregres bersama  $DAU_{2001}$ ,  $PAD_{2001}$  tidak bisa digunakan untuk memprediksi  $BD_{2002}$ . Namun pada tahun – tahun berikutnya (2002, 2003, 2004) PAD pada masing – masing Pemda di Jawa Tengah mengalami peningkatan sehingga ketika dianalisis dengan menggunakan regresi berganda DAU bisa digunakan untuk memprediksi besarnya belanja daerah tahun berikutnya, ini ditunjukkan dengan signifikan yang 0,000.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika dianalisis dengan menggunakan regresi berganda DAU dan PAD tahun lalu memberikan pengaruh terhadap besarnya belanja daerah tahun berjalan, dengan demikian besarnya belanja daerah dapat diprediksikan dengan besarnya DAU dan PAD tahun yang

lalu, artinya jika ada peningkatan dalam jumlah  $DAU_{t-1}$  dan  $PAD_{t-1}$ , maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah  $BD_t$ . Sehingga dalam hal ini dengan melihat DAU dan PAD tahun lalu pemerintah daerah dapat memperkirakan dalam menentukan besarnya dana yang akan dikeluarkan untuk belanja daerah.

#### 4.3. Pengujian terhadap *Flypapper Effect*

*Flypapper Effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari pada stimulus yang disebabkan oleh perubahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menentukan apakah terjadi *Flypapper Effect*, maka efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD. Dalam regresi tunggal, koefisien regresi, nilai t-statistic, F-statistic,  $R$ ,  $R^2$  dan *Adjusted-R<sup>2</sup>* masing – masing variabel (regresi) dibandingkan antara DAU dan PAD, apabila efek yang ditimbulkan oleh perubahan DAU terhadap BD lebih besar daripada efek yang ditimbulkan PAD terhadap BD maka dapat disimpulkan terjadi *Flypapper Effect*.

Perbandingan dari masing – masing variabel untuk regresi sederhana tanpa *lag* dapat dilihat dalam tabel 4.7

TABEL 4.7

Perbandingan Pengaruh *DAU*, dengan *PAD*, terhadap *BD*,

$BD_t = -14469130,01 + 1,338DAU_t$	$BD_t = 220272555,507 + 3,126PAD_t$	
Sig = 0,000 <i>t</i> -statistic = 20,375	Sig = 0,000 <i>t</i> -statistic = 9,158	A>B
<i>F</i> -statistic = 429,944	<i>F</i> -statistic = 83,87	A>B
$R(R^2) = 0,870(0,757)$	$R(R^2) = 0,615(0,378)$	A>B
<i>Adjusted</i> - $R^2 = 0,755$	<i>Adjusted</i> - $R^2 = 0,374$	A>B

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *t*-statistic, *F*-statistic, *R*,  $R^2$  dan *Adjusted*- $R^2$  masing – masing variabel (regresi) *DAU* lebih besar daripada *PAD*, hal ini menunjukkan pengaruh perubahan *DAU* terhadap *BD* lebih besar daripada pengaruh perubahan *PAD* terhadap *BD* dan menunjukkan keberadaan *flypapper effect* dan sekaligus menegaskan hipotesis pertama dari hipotesis ketiga (*H3a*) tidak dapat ditolak.

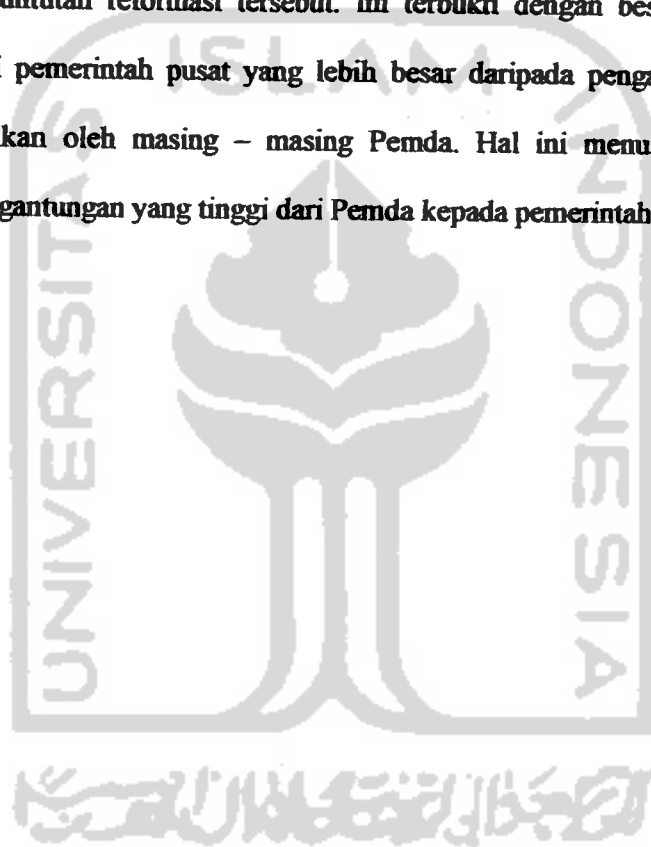
TABEL 4.8

Perbandingan Pengaruh  $DAU_{t-1}$  dengan  $PAD_{t-1}$  terhadap  $BD_t$ 

$BD_{2002} = 52397722,18 + 1,031DAU_{2001}$	$BD_{2002} = 236417100,3 + 1,898PAD_{2001}$	
Sig = 0,000 $t - statistic = 10,087$	Sig = 0,038 $t - statistic = 2,164$	A>B
$F - statistic = 101,739$	$F - statistic = 4,682$	A>B
$R(R^2) = 0,869(0,755)$	$R(R^2) = 0,353(0,124)$	A>B
$Adjusted - R^2 = 0,748$	$Adjusted - R^2 = 0,098$	A>B
$BD_{2003} = 22127468,328 + 1,501DAU_{2002}$	$BD_{2003} = 270096035,017 + 3,457PAD_{2002}$	
Sig = 0,000 $t - statistic = 10,321$	Sig = 0,000 $t - statistic = 4,689$	A>B
$F - statistic = 106,52$	$F - statistic = 21,986$	A>B
$R(R^2) = 0,874(0,763)$	$R(R^2) = 0,632(0,400)$	A>B
$Adjusted - R^2 = 0,756$	$Adjusted - R^2 = 0,382$	A>B
$BD_{2004} = 44709397,948 + 1,258DAU_{2003}$	$BD_{2004} = 274885680,921 + 2,889PAD_{2003}$	
Sig = 0,000 $t - statistic = 10,231$	Sig = 0,000 $t - statistic = 4,757$	A>B
$F - statistic = 104,673$	$F - statistic = 22,629$	A>B
$R(R^2) = 0,872(0,760)$	$R(R^2) = 0,638(0,407)$	A>B
$Adjusted - R^2 = 0,753$	$Adjusted - R^2 = 0,389$	A>B

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai  $t$ -statistic,  $F$ -statistic,  $R$ ,  $R^2$  dan  $Adjusted - R^2$  masing - masing variabel (regresi)  $DAU_{t-1}$  lebih besar daripada  $PAD_{t-1}$ , hal ini menunjukkan pengaruh perubahan  $DAU_{t-1}$  terhadap  $BD$  lebih besar daripada pengaruh perubahan  $PAD_{t-1}$  terhadap  $BD$  dan menunjukkan keberadaan *flypapper effect* dan sekaligus menegaskan hipotesis kedua dari hipotesis ketiga (H3b) tidak dapat ditolak.

Dari hasil pengujian terhadap *flypapper effect* baik tanpa *lag* maupun menggunakan *lag* 1 tahun menunjukkan tentang keberadaan *flypapper effect* pada Pemda di Jawa Tengah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa walaupun otonomi daerah sudah diberlakukan di Indonesia, pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Tengah sebenarnya belum memiliki kesiapan yang cukup untuk melaksanakan salah satu tuntutan reformasi tersebut. Ini terbukti dengan besarnya pengaruh transfer dari pemerintah pusat yang lebih besar daripada pengaruh pendapatan yang dihasilkan oleh masing – masing Pemda. Hal ini menunjukkan adanya tingkat ketergantungan yang tinggi dari Pemda kepada pemerintah pusat.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 untuk keseluruhan Pemda di Jawa Tengah dan hasil dari pengolahan data tersebut, penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan signifikan  $0,000 < 0,05$  dan nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel yang bermakna apabila terjadi peningkatan DAU maka akan diikuti dengan peningkatan pada belanja daerah. Demikian juga ketika regresi sederhana menggunakan *log 1* tahun, DAU tahun lalu juga memberikan pengaruh yang positif terhadap belanja daerah tahun berjalan dengan signifikan  $0,000 < 0,05$  dan nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel. Sehingga dengan melihat DAU tahun lalu pemerintah daerah bisa memperkirakan besarnya dana yang akan dikeluarkan untuk belanja daerah. Hasil ini konsisten dengan pandangan Holtz-Eakin et al (1985) dan penelitian yang dilakukan Abdullah Syukriy dan Abdul Halim.
2. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa PAD yang dihasilkan oleh masing – masing Pemda di Jawa Tengah menunjukkan pengaruh yang positif terhadap

belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan signifikan  $0,000 < 0,05$  dan nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel yang bermakna apabila terjadi peningkatan PAD maka akan diikuti dengan peningkatan pada belanja daerah. PAD tahun lalu juga memberikan pengaruh yang positif terhadap belanja daerah tahun berjalan dengan signifikan 0,038 untuk tahun 2001, 0,000 untuk tahun 2002, 0,000 untuk tahun 2003  $< 0,05$  dan nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar kedua variabel. Sehingga dengan melihat PAD tahun lalu pemerintah daerah bisa memperkirakan besarnya dana yang akan dikeluarkan untuk belanja daerah. Besarnya PAD yang dihasilkan oleh Pemda menunjukkan kemampuan dan potensi keuangan Pemda itu sendiri. Hasil ini konsisten dengan pandangan Holtz-Eakin et al (1985) dan penelitian yang dilakukan Abdullah Syukriy dan Abdul Halim.

3. Ketika DAU dan PAD dianalisis dengan menggunakan regresi berganda hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan ditunjukkan dengan signifikan  $0,000 < 0,05$  dan nilai R yang positif menunjukkan hubungan yang positif antar variabel. Pada saat DAU dan PAD diregres dengan menggunakan *lag* 1 tahun signifikan pada  $PAD_{2001}$  adalah 0,198 hal ini dikarenakan pada tahun 2001 PAD pada masing – masing Pemda di Jawa Tengah masih rendah sehingga ketika diregres bersama  $DAU_{2001}$ ,  $PAD_{2001}$  tidak bisa digunakan untuk memprediksi  $BD_{2002}$ . Namun pada tahun – tahun berikutnya (2002, 2003,

2004) PAD pada masing – masing Pemda di Jawa Tengah mengalami peningkatan sehingga ketika di regres bersama DAU bisa digunakan untuk memprediksi besarnya belanja daerah tahun berikutnya, ini ditunjukkan dengan signifikan yang 0,000.

4. Pada saat hasil dari masing – masing pengujian itu dibandingkan satu sama lain terlihat bahwa nilai t-statistic, F-statistic,  $R$ ,  $R^2$  dan *Adjusted – R<sup>2</sup>* masing – masing variabel (regresi) DAU lebih besar daripada PAD, hal ini menunjukkan pengaruh perubahan DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh perubahan PAD terhadap BD dan menunjukkan keberadaan *flypapper effect*, hasil ini juga menunjukkan bahwa walaupun otonomi daerah sudah diberlakukan di Indonesia, pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Tengah sebenarnya belum memiliki kesiapan yang cukup untuk melaksanakan salah satu tuntutan reformasi tersebut. Ini terbukti dengan besarnya pengaruh transfer dari pemerintah pusat yang lebih besar daripada pengaruh pendapatan yang dihasilkan oleh masing – masing Pemda. Hal ini menunjukkan adanya tingkat ketergantungan yang tinggi dari Pemda kepada pemerintah pusat.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan pada penelitian – penelitian berikutnya. Penelitian ini hanya menggunakan sampel kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk inferensi pada kasus di provinsi lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat tahun (2001, 2002, 2003, 2004) sehingga belum dapat dilakukan analisis yang lebih komprehensif. Untuk itu pada

penelitian – penelitian sesudahnya perlu adanya penambahan data baik untuk jumlah kurun waktu maupun untuk jumlah kabupaten/ kota.

### 5.3. Saran

Berdasarkan pembahasan, analisis hasil dan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini maka penulis mengajukan saran:

- a. Melihat adanya pengaruh DAU terhadap belanja daerah, maka pemerintah pusat perlu terus memperbaiki formulasi DAU sehingga diharapkan DAU yang diberikan pemerintah pusat dapat memenuhi kebutuhan di daerah.
- b. Adanya pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan APBN dan Kepres tentang DAU jauh sebelum tahun berjalan sehingga daerah dapat menyusun APBD dengan lebih baik.
- c. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga perlu untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai daerahnya sebagai salah satu indikator kemandirian daerah demi suksesnya pelaksanaan otonomi daerah
- d. Karena PAD juga memiliki pengaruh terhadap belanja daerah maka pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber – sumber penerimaan yang berasal dari daerah, sehingga kemampuan daerah dalam memenuhi APBDnya akan meningkat dengan harapan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat akan lebih baik.
- e. Bagi peneliti berikutnya perlu dilakukan dengan memperbanyak sampel dan memperpanjang kurun waktu sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, selain itu juga perlu diperhatikan aspek – aspek lain seperti aspek

psikologis dan personalitas pembuat keputusan atau faktor – faktor yang menyebabkan perubahan DAU dan PAD.

Adanya pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan APBN dan Kepres tentang DAU jauh sebelum tahun berjalan sehingga daerah dapat menyusun APBD dengan lebih baik.

#### 5.4. Implikasi

Dari simpulan penelitian ini memberikan implikasi yang diharapkan dapat membantu pembenahan alokasi keuangan daerah dalam proses pemerataan keuangan antar daerah oleh pemerintah pusat. Implikasi – implikasi tersebut adalah:

- b. Bagi pemerintah daerah dimasa otonomi dapat dipergunakan dalam memaksimalkan PAD mereka sehingga *gap* antara dana transfer dari pemerintah dapat diperkecil.
- c. Membuka wawasan baru mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah Belanja Daerah, dengan demikian dapat mendukung dan memberi pertimbangan dalam membuat keputusan yang lebih baik.
- d. Bagi kalangan akademisi pengembangan penelitian tentang belanja daerah dan variabel – variabel yang mempengaruhinya sangat diperlukan dengan harapan dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator dalam menilai kemandirian dan kemampuan menejemen kekayaan suatu daerah mungkin untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy & Abdul Halim, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Jawa dan Bali*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003

Halim, Abdul, *Anggaran Daerah dan "Fiscal stress" (Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2001

\_\_\_\_\_, *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004

Hadi, Syamsul, *Memanfaatkan Exel Untuk Analisis Statistik*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002

\_\_\_\_\_, *Menejemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam Era Otonomi Daerah*, KEBI STIEKERS

\_\_\_\_\_, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002

Menteri Dalam Negeri, *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Nuryadin, Didi, *Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Kota Magelang*, Buletin Ekonomi, Vol. 2 No. 2, Agustus 2004, Hal 136-156

Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 181/2000 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota*

Republik Indonesia, *UU No 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan UU No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

\_\_\_\_\_, *UU No 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah*

Santoso, Singgih, *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS versi 11.5*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003



## LAMPIRAN 1

**Ringkasan Realisasi Belanja Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah**  
**Tahun Anggaran 2001-2004**  
**(000)**

No	Kabupaten/ Kota	2001	2002	2003	2004
1	Kab. Banjarnegara	198.874.720	253.205.380	331.694.770	344.791.090
2	Kab. Banyumas	341.320.790	374.393.380	471.777.490	488.534.620
3	Kab. Batang	186.301.940	215.516.010	296.802.730	325.408.820
4	Kab. Blora	258.148.040	327.882.530	398.203.760	377.671.510
5	Kab. Boyolali	242.887.420	287.112.590	390.543.660	395.622.550
6	Kab. Brebes	325.035.160	354.580.300	470.672.930	475.275.800
7	Kab. Cilacap	352.554.410	389.405.480	545.722.030	507.788.660
8	Kab. Demak	176.225.740	230.461.860	332.075.970	335.464.950
9	Kab. Grobogan	285.594.560	320.855.970	424.580.830	473.481.020
10	Kab. Jepara	257.532.590	290.306.770	370.344.030	385.527.380
11	Kab. Karangayar	238.717.250	266.567.400	348.659.940	351.188.880
12	Kab. Kebumen	264.447.180	352.473.700	431.376.490	427.806.040
13	Kab. Kendal	265.534.770	358.644.110	407.490.040	396.809.050
14	Kab. Klaten	320.287.040	364.272.110	483.962.190	494.976.200
15	Kab. Kudus	211.903.520	147.980.910	329.560.870	335.573.020
16	Kab. Magelang	266.170.330	361.898.948	390.323.610	417.632.230
17	Kab. Pati	282.090.785	315.040.840	419.773.700	437.343.080
18	Kab. Pekalongan	191.825.090	256.791.680	304.568.120	311.462.410
19	Kab. Pemasang	241.889.350	281.545.500	408.865.100	417.909.670
20	Kab. Purbalingga	235.681.400	280.918.930	350.141.650	346.236.140
21	Kab. Porworejo	260.667.770	278.232.230	374.020.350	353.881.410
22	Kab. Rembang	180.771.130	202.741.510	265.460.000	286.605.170



23	Kab. Semarang	230.342.780	285.329.670	357.769.620	363.569.880
24	Kab. Sragen	250.634.840	276.284.950	390.467.390	380.335.920
25	Kab. Sukoharjo	205.601.790	239.662.080	336.907.120	328.493.080
26	Kab. Tegal	274.392.310	310.179.620	445.003.510	439.398.560
27	Kab. Temanggung	216.189.010	254.228.530	321.522.390	307.170.940
28	Kab. Wonogiri	257.368.550	300.401.010	403.593.890	421.874.650
29	Kab. Wonosobo	177.333.920	235.247.000	335.183.940	351.619.870
30	Kota Magelang	105.759.820	141.375.820	178.912.850	175.413.690
31	Kota Pekalongan	96.798.860	133.676.210	168.958.370	180.287.990
32	Kota Salatiga	74.547.310	110.040.020	161.956.860	168.950.590
33	Kota Semarang	419.529.050	308.716.500	663.887.750	661.416.260
34	Kota Surakarta	209.337.380	262.624.680	351.968.340	328.310.680
35	Kota Tegal	122.265.280	158.163.670	218.966.950	252.064.890



## LAMPIRAN 2

## Ringkasan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

## Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah

## Tahun Anggaran 2001-2004

(000)

No	Kabupaten/ Kota	2001	2002	2003	2004
1	Kab. Banjarnegara	209.841.730	215.477.410	248.820.000	260.996.000
2	Kab. Banyumas	293.426.140	321.924.060	381.941.930	374.866.990
3	Kab. Batang	211.883.530	212.735.650	224.887.870	222.399.000
4	Kab. Blora	285.249.670	286.552.490	270.140.000	285.249.980
5	Kab. Boyolali	212.748.560	250.946.370	292.070.000	303.635.550
6	Kab. Brebes	272.829.570	304.222.460	257.380.000	375.145.860
7	Kab. Cilacap	315.850.700	328.181.810	368.270.000	405.543.790
8	Kab. Demak	148.362.830	196.740.000	245.940.000	274.319.730
9	Kab. Grobogan	244.117.430	268.106.390	339.381.580	331.415.000
10	Kab. Jepara	233.777.840	232.522.270	248.660.000	258.973.000
11	Kab. Karangayar	199.130.490	222.497.810	266.550.000	277.906.000
12	Kab. Kebumen	269.691.410	287.464.210	315.400.000	339.716.000
13	Kab. Kendal	286.806.430	286.810.000	270.560.000	286.808.000
14	Kab. Klaten	287.601.610	331.679.050	409.386.140	362.345.000
15	Kab. Kudus	175.589.730	185.867.630	228.308.490	229.738.000
16	Kab. Magelang	236.741.290	269.800.000	300.629.990	304.621.000
17	Kab. Pati	247.197.510	266.500.000	300.900.000	316.828.680
18	Kab. Pekalongan	205.219.040	206.186.370	222.580.000	233.319.000
19	Kab. Pemasang	223.787.950	250.279.320	297.359.580	312.263.680
20	Kab. Purbalingga	224.657.760	234.944.960	254.460.360	246.694.000
21	Kab. Porworejo	200.412.630	225.780.000	269.059.880	275.190.000
22	Kab. Rembang	160.094.660	173.125.940	188.930.000	196.642.000

23	Kab. Semarang	195.599.910	215.290.000	258.283.870	286.217.000
24	Kab. Sragen	215.887.280	238.900.000	271.940.000	283.621.000
25	Kab. Sukoharjo	154.866.420	213.634.140	273.518.050	261.710.730
26	Kab. Tegal	301.504.120	256.867.600	309.629.610	340.516.640
27	Kab. Temanggung	181.604.820	196.610.000	221.660.000	228.086.000
28	Kab. Wonogiri	239.731.590	253.974.330	311.090.000	326.104.000
29	Kab. Wonosobo	207.242.120	215.728.580	237.249.610	246.292.320
30	Kota Magelang	103.011.670	106.457.888	119.980.000	122.298.000
31	Kota Pekalongan	79.989.080	99.269.950	122.170.000	125.408.000
32	Kota Salatiga	77.107.930	100.590.970	105.690.000	107.734.000
33	Kota Semarang	254.262.360	266.950.000	308.710.000	314.104.410
34	Kota Surakarta	111.630.280	178.390.000	232.342.000	218.045.000
35	Kota Tegal	194.284.040	163.413.860	151.650.000	169.057.750



## LAMPIRAN 3

## Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD)

## Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah

## Tahun Anggaran 2001-2004

(000)

No	Kabupaten/ Kota	2001	2002	2003	2004
1	Kab. Banjarnegara	12.022.780	22.038.390	25.303.140	30.622.370
2	Kab. Banyumas	30.447.270	37.499.520	45.045.840	51.224.310
3	Kab. Batang	14.368.780	21.384.880	23.308.570	23.610.800
4	Kab. Blora	16.481.410	25.757.560	26.933.910	29.530.460
5	Kab. Boyolali	17.675.170	24.460.330	32.781.310	36.960.020
6	Kab. Brebes	14.520.910	19.793.000	25.288.380	25.735.110
7	Kab. Cilacap	32.112.950	46.833.920	48.301.120	53.499.090
8	Kab. Demak	11.117.810	14.597.120	16.172.530	17.449.370
9	Kab. Grobogan	18.449.540	27.067.570	37.296.070	37.038.760
10	Kab. Jepara	20.099.330	45.111.750	53.740.240	47.266.550
11	Kab. Karangayar	16.550.710	23.188.520	25.196.920	29.485.260
12	Kab. Kebumen	14.210.180	22.760.200	29.807.200	26.264.660
13	Kab. Kendal	21.717.220	34.830.020	37.174.070	31.671.370
14	Kab. Klaten	13.832.060	17.519.440	22.288.970	27.047.600
15	Kab. Kudus	22.124.960	30.185.280	38.842.600	41.617.400
16	Kab. Magelang	23.737.340	29.445.623	35.808.180	43.687.040
17	Kab. Pati	25.022.520	23.411.770	40.826.750	55.030.350
18	Kab. Pekalongan	14.472.500	22.278.220	22.734.770	27.224.990
19	Kab. Pemasang	19.368.770	25.001.560	28.982.710	26.905.820
20	Kab. Purbalingga	15.122.500	23.603.060	28.300.570	28.619.780
21	Kab. Porworejo	15.088.380	20.733.840	21.882.950	26.277.060
22	Kab. Rembang	9.450.250	14.427.180	18.295.450	18.715.700

23	Kab. Semarang	18.923.180	30.058.620	40.269.710	44.634.640
24	Kab. Sragen	15.884.600	24.347.950	42.976.690	43.547.110
25	Kab. Sukoharjo	14.787.710	18.555.320	19.929.270	21.701.840
26	Kab. Tegal	18.599.210	32.581.300	38.336.280	39.008.420
27	Kab. Temanggung	11.194.680	18.021.900	18.580.060	19.572.480
28	Kab. Wonogiri	14.224.170	23.108.190	25.998.750	25.290.370
29	Kab. Wonosobo	14.984.920	26.380.310	24.385.840	23.869.510
30	Kota Magelang	12.311.340	19.191.420	23.567.460	22.628.700
31	Kota Pekalongan	7.327.370	11.629.270	13.679.480	15.864.600
32	Kota Salatiga	10.501.680	17.703.830	20.181.960	21.619.400
33	Kota Semarang	85.524.470	122.590.240	143.157.300	155.824.660
34	Kota Surakarta	35.852.030	45.112.370	54.815.680	59.632.520
35	Kota Tegal	1.757.679	30.410.520	35.147.570	42.359.750



**LAMPIRAN 4**  
**HASIL PENGOLAHAN DATA**

**1. Regresi Belanja Daerah – Dana Alokasi Umum**

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,870 <sup>a</sup>	,757	,755	51951229,8

a. Predictors: (Constant), DAU

b. Dependent Variable: BD

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,16E+18	1	1,160E+18	429,944	,000 <sup>a</sup>
	Residual	3,72E+17	138	2,699E+15		
	Total	1,53E+18	139			

a. Predictors: (Constant), DAU

b. Dependent Variable: BD

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-14469130,01	16345150,56		-,885	,378
	DAU	1,338	,065	,870	20,735	,000

a. Dependent Variable: BD

2. Regresi Belanja Daerah – Dana Alokasi Umum dengan lag 1 tahun  
BD 2002 – DAU 2001

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU_01 <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD\_02

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,869 <sup>a</sup>	,755	,748	36295751,0

a. Predictors: (Constant), DAU\_01

b. Dependent Variable: BD\_02

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,34E+17	1	1,340E+17	101,739	,000 <sup>a</sup>
	Residual	4,35E+16	33	1,317E+15		
	Total	1,78E+17	34			

a. Predictors: (Constant), DAU\_01

b. Dependent Variable: BD\_02

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	52397722,18	22638031,07		2,315	,027
	DAU_01	1,031	,102	,869	10,087	,000

a. Dependent Variable: BD\_02

## BD 2003 – DAU 2002

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU_02 <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD\_03

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,874 <sup>a</sup>	,763	,756	49775294,5

a. Predictors: (Constant), DAU\_02

b. Dependent Variable: BD\_03

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,64E+17	1	2,639E+17	106,520	,000 <sup>a</sup>
	Residual	8,18E+16	33	2,478E+15		
	Total	3,46E+17	34			

a. Predictors: (Constant), DAU\_02

b. Dependent Variable: BD\_03

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22127468,33	34556710,89		,640	,526
	DAU_02	1,501	,145	,874	10,321	,000

a. Dependent Variable: BD\_03



## BD 2004 – DAU 2003

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU_03 <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD\_04

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,872 <sup>a</sup>	,760	,753	48912283,8

a. Predictors: (Constant), DAU\_03

b. Dependent Variable: BD\_04

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,50E+17	1	2,504E+17	104,673	,000 <sup>a</sup>
	Residual	7,89E+16	33	2,392E+15		
	Total	3,29E+17	34			

a. Predictors: (Constant), DAU\_03

b. Dependent Variable: BD\_04

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	44709397,95	33111287,75		1,350	,186
	DAU_03	1,258	,123	,872	10,231	,000

a. Dependent Variable: BD\_04

## 3. Regresi Belanja Daerah – Pendapatan Asli Daerah

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,615 <sup>a</sup>	,378	,374	83118797,4

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: BD

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,79E+17	1	5,794E+17	83,870	,000 <sup>a</sup>
	Residual	9,53E+17	138	6,909E+15		
	Total	1,53E+18	139			

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: BD

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	220272555,51	12233244,81		18,006	,000
	PAD	3,126	,341	,615	9,158	,000

a. Dependent Variable: BD

4. Regresi Belanja Daerah – Pendapatan Asli Daerah dengan lag 1 tahun  
BD 2002 – PAD 2001

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD_01 <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD\_02

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,353 <sup>a</sup>	,124	,098	68633112,9

a. Predictors: (Constant), PAD\_01

b. Dependent Variable: BD\_02

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,21E+16	1	2,206E+16	4,682	,038 <sup>a</sup>
	Residual	1,55E+17	33	4,711E+15		
	Total	1,78E+17	34			

a. Predictors: (Constant), PAD\_01

b. Dependent Variable: BD\_02

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	236417100,3	20197353,14		11,705	,000
	PAD_01	1,898	,877	,353	2,164	,038

a. Dependent Variable: BD\_02

## BD 2003 – PAD 2002

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD_02 <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD\_03

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,632 <sup>a</sup>	,400	,382	79287515,0

a. Predictors: (Constant), PAD\_02

b. Dependent Variable: BD\_03

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,38E+17	1	1,382E+17	21,986	,000 <sup>a</sup>
	Residual	2,07E+17	33	6,287E+15		
	Total	3,46E+17	34			

a. Predictors: (Constant), PAD\_02

b. Dependent Variable: BD\_03

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	270096035,02	24819691,05		10,882	,000
	PAD_02	3,457	,737	,632	4,689	,000

a. Dependent Variable: BD\_03

## BD 2004 – PAD 2003

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD_03 <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD\_04

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,638 <sup>a</sup>	,407	,389	76946858,2

a. Predictors: (Constant), PAD\_03

b. Dependent Variable: BD\_04

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,34E+17	1	1,340E+17	22,629	,000 <sup>a</sup>
	Residual	1,95E+17	33	5,921E+15		
	Total	3,29E+17	34			

a. Predictors: (Constant), PAD\_03

b. Dependent Variable: BD\_04

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	274885680,92	24337475,58		11,295	,000
	PAD_03	2,889	,607	,638	4,757	,000

a. Dependent Variable: BD\_04

## 5. Regresi BD – DAU dan PAD

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD, DAU <sup>b</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,931 <sup>a</sup>	,866	,864	38691792,7

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,33E+18	2	6,639E+17	443,453	,000 <sup>a</sup>
	Residual	2,05E+17	137	1,497E+15		
	Total	1,53E+18	139			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-20631259,76	12187344,85		-1,693	,093
	DAU	1,148	,051	,746	22,357	,000
	PAD	1,794	,170	,353	10,573	,000

a. Dependent Variable: BD

## 6. Regresi BD – DAU dan PAD dengan lag 1 tahun

BD 2002 – DAU 2001 dan PAD 2001

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD_01, <sup>a</sup> DAU_01	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD\_02

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,876 <sup>a</sup>	,768	,753	35901016,4

a. Predictors: (Constant), PAD\_01, DAU\_01

b. Dependent Variable: BD\_02

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,36E+17	2	6,813E+16	52,859	,000 <sup>a</sup>
	Residual	4,12E+16	32	1,289E+15		
	Total	1,78E+17	34			

a. Predictors: (Constant), PAD\_01, DAU\_01

b. Dependent Variable: BD\_02

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	48872541,28	22551688,86		2,167	,038
	DAU_01	,992	,105	,836	9,413	,000
	PAD_01	,629	,478	,117	1,315	,198

a. Dependent Variable: BD\_02

## BD 2003 – DAU 2002 dan PAD 2002

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD_02, DAU_02 <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD\_03

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,968 <sup>a</sup>	,937	,933	26187108,6

a. Predictors: (Constant), PAD\_02, DAU\_02

b. Dependent Variable: BD\_03

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,24E+17	2	1,619E+17	236,033	,000 <sup>a</sup>
	Residual	2,19E+16	32	6,858E+14		
	Total	3,46E+17	34			

a. Predictors: (Constant), PAD\_02, DAU\_02

b. Dependent Variable: BD\_03

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	489211,82	18327545,42		,027	,979
	DAU_02	1,305	,079	,760	16,447	,000
	PAD_02	2,358	,253	,431	9,339	,000

a. Dependent Variable: BD\_03



## BD 2004 – DAU 2003 dan PAD 2003

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD_03 <sup>a</sup> DAU_03	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: BD\_04

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,961 <sup>a</sup>	,923	,918	28224231,7

a. Predictors: (Constant), PAD\_03, DAU\_03

b. Dependent Variable: BD\_04

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,04E+17	2	1,519E+17	190,733	,000 <sup>a</sup>
	Residual	2,55E+16	32	7,966E+14		
	Total	3,29E+17	34			

a. Predictors: (Constant), PAD\_03, DAU\_03

b. Dependent Variable: BD\_04

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25922542,40	19243603,92		1,347	,187
	DAU_03	1,083	,074	,750	14,604	,000
	PAD_03	1,907	,233	,421	8,192	,000

a. Dependent Variable: BD\_04